# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1. Latar belakang.

A. Data Umum

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin Kesehatan ibu hamil, Kesehatan bayi, Kesehatan balita, Kesehatan anak usia sekolah, yang merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Untuk mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, diselenggarakan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan transformasi Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks peningkatan layanan Kesehatan masyarakat. BOK menyediakan sumber daya finansial yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan Kesehatan yang esensial, termasuk program-program promotif dan preventif. Kegiatan seperti imunisasi, pelayanan posyandu, serta kunjungan rumah bagi masyarakat menjadi inti dari upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas Kesehatan.

Ketika pengelolaan BOK dilakukan dengan baik, maka Puskesmas dapat menjalankan kegiatan tersebut secara optimal, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Namun, jika pengelolaannya tidak optimal, dampaknya bisa sangat merugikan. Akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan dapat terganggu, sehingga program-program pencegahan penyakit, edukasi Kesehatan, dan layanan dasar lainnya terhambat.

Lebih jauh lagi, pengelolaan BOK yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan ketidaktransparanan penggunaan anggaran, yang akhirnya berpotensi merugikan keberlanjutan program Kesehatan di tingkat Puskesmas. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan BOK yang efektif tak hanya berkontribusi pada peningkatan layanan Kesehatan, tetapi juga menjamin keadilan akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Dengan demikian, pengelolaan BOK yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan Kesehatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memegang peranan penting dalam mendukung pelayanan Kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan BOK menjadi suatu keharusan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau inefisiensi dalam penggunaannya.

Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kesehatan. Dengan sistem yang transparan, setiap alokasi dan penggunaan dana BOK dapat diawasi dan diperiksa baik oleh instansi Pemerintah yang berwenang maupun oleh publik. Ini penting untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk mendanai kegiatan-kegiatan Kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketidaktransparanan dalam pengelolaan BOK berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan dana, seperti pengeluaran yang tidak sesuai dengan program yang telah ditentukan atau pemborosan dalam kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap Kesehatan masyarakat. Misalnya, tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, dana BOK bisa saja digunakan untuk kepentingan lain yang tidak terkait dengan Kesehatan, atau bahkan terjadi manipulasi laporan penggunaan dana untuk menjadi perhatian dalam teknis dilapangan bahwa perencanaan kegiatan bersumber Dana BOK tidak boleh diusulkan lagi dengan sumber pendanaan lain agar tidak terjadi tumpang tindig sumber anggaran.

Selain itu, inefisiensi dalam pengelolaan BOK dapat muncul dari kurangnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran yang berbasis data. Jika

perencanaan tidak dilakukan dengan baik, dana yang tersedia mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pengelolaan BOK harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam rangka meningkatkan transparansi, penggunaan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi efektif. Sistem manajemen data yang transparan dapat memudahkan pemantauan penggunaan dana, menghasilkan laporan yang jelas, serta memungkinkan akses informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan transparansi dalam pengelolaan BOK tidak hanya melindungi dana publik dari penyalahgunaan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan akhir yaitu peningkatan layanan Kesehatan bagi masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan Pemerintah pusat DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik termasuk pelayanan Kesehatan terutama dalam rangka pelaksanaan transformasi sistem Kesehatan di daerah.

Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan Kesehatan di daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pengelolaan Dana BOK tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan Dana BOK perlu disusun petunjuk operasional pengelolaan yang memuat penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Dana BOK Dinas dan Dana BOK Puskesmas

Dana BOK mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penguatan reformasi sistem Kesehatan nasional.

Dana BOK bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan Kesehatan lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan Kesehatan dan mengupayakan dengan sungguhsungguh pemenuhan anggaran pembangunan Kesehatan. Kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOK tidak dapat dibiayai menggunakan sumber pembiayaan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya (Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran BOK PERMENDAGRI No 12 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana BOK Puskesmas pada Pemda).

Dana BOK mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan pendidikan dengan target utama pembangunan yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting serta penguatan reformasi sistem Kesehatan nasional. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pencapaian berbagai indikator Kesehatan nasional, termasuk penurunan angka stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan program Kesehatan ibu-anak. Berikut adalah penjelasan mengenai kontribusi BOK dalam masing-masing indikator tersebut:

1. **Penurunan Angka Stunting**

   BOK menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung program-program gizi dan Kesehatan anak. Melalui BOK, Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan anak, penyuluhan gizi, serta pemberian makanan tambahan bagi balita yang berada dalam kondisi berisiko stunting. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak yang merupakan faktor kunci dalam mencegah stunting. Selain itu, BOK juga memungkinkan adanya pelatihan bagi petugas Kesehatan tentang cara mendeteksi dan menangani masalah gizi, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

2. **Peningkatan Cakupan Imunisasi**

   BOK berperan penting dalam mendanai program imunisasi, yang merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat. Dana dari BOK

digunakan untuk penyelenggaraan imunisasi rutin, termasuk vaksinasi untuk penyakit yang dapat dicegah seperti difteri, hepatitis B, dan polio. Dengan adanya BOK, Puskesmas dapat memfasilitasi kegiatan imunisasi yang lebih luas, termasuk mobilisasi masyarakat untuk membawa anak-anak ke pos imunisasi dan menyediakan sarana yang diperlukan, seperti vaksin dan alat suntik. Peningkatan cakupan imunisasi ini berkontribusi langsung terhadap penurunan angka kejadian penyakit infeksi, peningkatan Kesehatan anak, dan, secara keseluruhan, peningkatan status Kesehatan Masyarakat.

3. **Program Kesehatan Ibu-Anak**

BOK juga mendukung berbagai program Kesehatan ibu-anak, yang sangat krusial untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dana BOK memungkinkan Puskesmas untuk melaksanakan kunjungan rumah bagi ibu hamil, menyediakan layanan antenatal, serta mendukung pelaksanaan persalinan yang aman. Selain itu, BOK bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan melalui pelatihan bagi tenaga Kesehatan dalam memberikan edukasi tentang Kesehatan reproduksi, perawatan prenatal, dan neonatal. Dengan cara ini, BOK membantu meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan bagi ibu selamanya, sehingga berkontribusi pada Kesehatan ibu dan anak serta penurunan angka kematian maternal dan neonatal.

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja (Kepmenkes RI, 2006). Puskesmas merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat agar tidak mengganggu Kesehatan manusia dan sekitarnya. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Pasal 1, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan upaya Kesehatan perorangan (UKP) Tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promosi dan pencegahan untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi mungkin di wilayah kerjanya. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraannya sesuai dengan Permenkes RI No. 75 Tahun 2014 Pasal 25, Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap. Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak memberikan pelayanan rawat inap kecuali pertolongan

persalinan normal. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk memberikan pelayanan rawat inap sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang dialokasikan ke Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait program prioritas bidang Kesehatan yang tertuang dalam RKP, terutama kunjungan lapangan untuk percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting.

## B. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

1). Ruang Lingkup Kinerja

Pengabdian kepada masyarakat dalam konteks pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran BOK dapat mendukung layanan Kesehatan dasar dengan lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Berikut adalah penjelasan masing – masing aspek yang harus diterapkan yaitu :

1. Peningkatan transparansi

Melakukan pelaporan yang jelas dalam pengelolaan BOK, transparansi sangat penting agar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan Pemerintah, dapat mengakses informasi tentang penggunaan dana. Puskesmas diharapkan menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara berkala dan jelas, yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini meliputi rincian aktivitas yang dibiayai BOK, jumlah dana yang digunakan, dan hasil dari berbagai program Kesehatan yang dilaksanakan. Melakukan Sosialisasi anggaran melalui kegiatan pertemuan Rutin Lintas Sektoral di Puskesmas mengenai rencana anggaran dan kegiatan BOK yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan supaya masyarakat memahami alokasi anggaran dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, transparansi akan meningkat, dan masyarakat merasa memiliki hak untuk memberikan masukan.

2. Peningkatan Akuntabilitas.

Mendampingi dan mengawasi pengelolaan BOK melibatkan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah, Puskesmas, hingga masyarakat. Puskesmas sebagai

pelaksana harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara administratif dan substantif. Proses pengawasan yang baik, terutama dari Dinas Kesehatan dan masyarakat, dapat memastikan bahwa dana BOK digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta melakukan audit dan evaluasi, mengecek kepatuhan terhadap prosedur tetapi juga menilai dampak dari penggunaan dana dalam peningkatan pelayanan Kesehatan. Transparansi hasil audit yang disampaikan kepada publik adalah langkah penting dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

3. Peningkatan Efektifitas Penggunaan anggaran.

Dengan melakukan pengembangan Sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehetan mengenai manajemen keuangan, penyusunan laporan, dan pelaksanaan program Kesehatan yang berbasis bukti dapat membantu memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai target-target Kesehatan.

Sebagai pengelola bahan perencanaan Kesehatan pendamping Puskesmas dalam pengelolaan Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), ada beberapa kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab untuk mencapai target di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan utama ini meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA**)**

Pengelola harus merencanakan dan menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas serta sasaran yang ingin dicapai, berdasarkan data dan prioritas Kesehatan di wilayah tersebut. RKA ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung layanan Kesehatan masyarakat. Pada tahap ini masih ditemukan permasalahan dari peryaratan yang harus dipenuhi oleh Puskesmas masih saja ditemukan ketidaksesuaian. Contoh dalam mendapatkan anggaran pada tahap salur 2 (dua) karena Bok dibagi 3 tahap penyaluran dimana ada persyaratan bahwa Puskesmas harus memenuhi persyaratan nilai penyerapan 50 % dari tahap 1. Jadi ada 2-3 puskesmas belum memenuhi peryaratan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk mengejar keterlambatan tersebut, berkomunikasi langsung dengan Kepala Puskesmas untuk menindaklanjuti agar segera memenuhi persyaratan sehingga bisa terakomodir pada gelombang selanjutnya yang di tentukan waktunya oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

   Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program-program Kesehatan yang didanai oleh BOK. Ini termasuk evaluasi terhadap pencapaian target, efektivitas kegiatan, serta efisiensi penggunaan dana. Pada tahapan ini dilakukan monitoring langsung ke lapangan untuk mengecek kesesuaian pelaporan dan kegiatan yang ada dilapangan. Kegiatan ini tidak semua dapat dikunjungi mengingat keterbatasan waktu dikarenakaan kegiatan lain yang harus diselesaiakan di bagian Perencanaan itu sendiri. Upaya yang dilakukan membuat jadwal kegiatan monitoring lapangan dengan membagi wilayah kunjungan terutama untuk daerah yang berada di luar kota karena dari wilayah tersebut Komunikasi yang dibangun melalui media komunikasi masih kurang aktif.

3. Penyusunan Laporan Keuangan dan Kegiatan

   Pengelola bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel mengenai penggunaan Dana BOK, serta laporan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam tahap ini masih terdapat ketidaksesuaian antara laporan dengan bukti rekening koran sebagai acuan dalam belanja kegiatan. Upaya yang dilakukan bekerjasama dengan bagian keuangan untuk memverifikasi setiap laporan yang dikirim oleh Pengelola BOK Puskesmas.

4. Koordinasi dengan Stakeholder

   Terkait mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, termasuk pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kegiatan yang didanai Dana BOK berjalan dengan lancar. Koordinasi juga mencakup komunikasi dengan pihak yang memberikan dana untuk memastikan pencapaian sasaran. Dalam tahap ini Pendamping memotivasi Puskesmas melalui Kepala Puskesmas untuk selalu menyampaikan jenis - jenis pelayanan kegiatan di lapangan kepada masyarakat dan melalui Lokakarya Mini Lintas Sektor (Lokmin Linsek) yang diadakan Puskesmas menyampaikan Capaian kinerjanya baik bersumber anggaran BOK maupun anggaran lainnya.

   Berikut adalah inovasi yang dapat diterapkan untuk mencapai target melalui kegiatan utama pengelolaan Dana BOK:

Untuk mengolah Inovasi dalam pendampingan Anggaran BOK Puskesmas agak rumit di tentukan. Akan tetapi, ada upaya dengan membuat spreadsheet laporan Realisasi Fisik & Keuangan (RFK) sebagai alat monitor laporan bulanan Puskesmas serta menjadi pembanding inputan pada aplikasi E-renggar yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Inovasi teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk pemantauan real-time penggunaan Dana BOK dan pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan aplikasi atau sistem manajemen data berbasis web, pengelola dapat melacak kemajuan program, melihat status anggaran, dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Misalnya, aplikasi pemantauan kegiatan Kesehatan atau dashboard yang mengintegrasikan data dari Puskesmas dan lapangan.

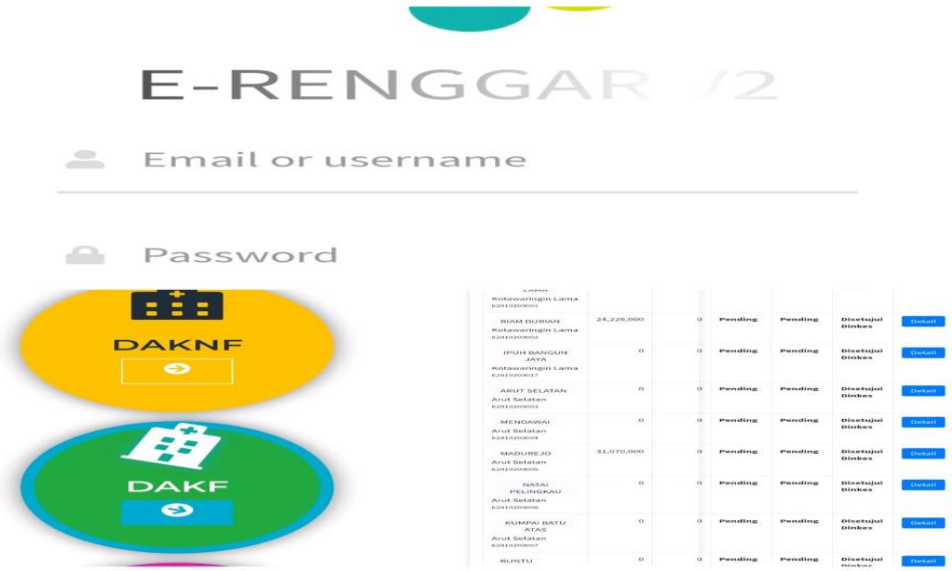


Gambar 1.1 Tampilan aplikasi E-renggar (Aplikasi Kemenkes)

## C. Tujuan Tugas Akhir Program RPL

A. Tujuan Umum

Dalam mengemban tugas sebagai pendamping pengelolaan anggaran BOK Puskesmas. Memastikan bahwa layanan Kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat diakses dengan baik dan berkualitas tinggi dan memastikan Puskesmas memperoleh dana, memanfaatkan dana dilakukan secara trasnparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Pemerintah.

B. Tujuan khusus

a. Memberikan Bimbingan teknis kepada pengelola BOK Puskesmas dalam penggunaan dan pengelolaan Dana BOK.
b. Meningkatkan kapasitas pengelola (pelatihan hal management perencanaan kegiatan, management keuangan dan pelaksanaan program).
c. Memastikan pemanfaatan yang Efesien dan Efektif serta tepat sasaran.
d. Monitoring dan Evaluasi, bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

## D. Manfaat Tugas Akhir Program RPL

1. Universitas
   a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman kerja.
   b. Meningkatkan kompetensi keilmuan, keterampilan profesional, dan soft skill melalui inovasi.
   c. Menghasilkan nilai tambah untuk pengembangan teori dan praktik pendidikan dengan dukungan fakta empiris.
2. Dinas Kesehatan
   a. Pengakuan keterampilan pegawai secara resmi, meningkatkan motivasi dan loyalitas.
   b. Mengurangi waktu dan biaya pelatihan dengan pengakuan pembelajaran lampau.
   c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan berkelanjutan.
   d. Meningkatkan produktivitas dan inovasi melalui tenaga kerja yang diakui kompetensinya.
3. Mahasiswa
   a. Mendapatkan pengakuan atas keterampilan dari pengalaman kerja.
   b. Menghemat waktu dan biaya pendidikan melalui RPL.
   c. Meningkatkan peluang karir dengan kualifikasi yang diakui secara formal.
   d. Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi karena pengakuan pengalaman.
   e. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat yang relevan dengan dunia kerja.